

PARADIGMA BARU PENDIDIKAN MENUJU MASYARAKAT MADANI

(TELAAH KRITIS TERHADAP PROBLEM PENDIDIKAN NASIONAL, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PEMECAHANNYA)

Oleh:

Dadan Rosana

FPMIPA IKIP Yogyakarta

Abstrak

Pengembangan sistem dan tata nilai kependidikan berjalan dengan sangat cepat didorong oleh semangat reformasi di berbagai bidang kehidupan. Tuntutan untuk pembentukan masyarakat madani menjadikan pendidikan sebagai suatu pendidikan yang sangat efektif. Untuk itu perlu dilakukan perubahan ke arah paradigma baru yang harus diikuti dengan telaah terhadap problem pendidikan nasional, arah kebijakan, dan strategi pemecahannya.

Kata kunci: Paradigma baru pendidikan, Masyarakat Madani

NEW PARADIGM OF EDUCATION TOWARD A CIVIL SOCIETY

(A CRITICAL REVIEW ON PROBLEMS OF
NATIONAL EDUCATION, THE DIRECTION
OF ITS POLICIES, AND ITS STRATEGIES OF
PROBLEM SOLVING)

Abstract

The educational system and values have developed very fast, urged by the spirit of reformation in various aspects of human life. The demand for the formation of a civil society has made education one very effective way to approach it. For that purpose, there needs to be a change towards a new paradigm which must be followed with a review on the problems of the national education, the direction of its policies, and its strategies of problem solving.

Pendahuluan

Masyarakat dunia yang senantiasa berkembang dari masa ke masa memaksa setiap bangsa untuk bekerja keras mengejar ketertinggalannya dalam segala bidang seiring dengan semakin cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumberdaya manusia yang berkualitas dalam pengertian mempunyai sifat inovatif-kreatif, serta menguasai iptek dan informasi secara memadai adalah

kunci untuk menjawab berbagai tantangan baru yang lebih berat sehubungan dengan hadirnya era globalisasi dan informasi.

Pada dasarnya manusia dapat berjalan sendiri, namun hanya sebagian kecil saja yang dapat memenuhi tingkat pengetahuan dan kemampuan yang diminta. Maka pendidikan sekolah menjadi sarana yang paling efektif (Wiranto Arismunandar, 1990). UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur sistem pendidikan nasional dan implementasinya akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Namun krisis yang kronis memaksa kita harus menatap ulang sistem kehidupan masyarakat kita termasuk Sistem Pendidikan Nasional. Ketika kita dipaksa memasuki millenium ketiga yang lebih menantang, justru kita sedang berada dalam kondisi terpuruk akibat kurang mapannya sistem kehidupan dan juga sistem pendidikan kita selama ini. Berbagai kelemahan muncul di sana-sini sebagai akibat dari kelemahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sistem. Kondisi ini tentu harus segera diperbaiki dengan mengacu pada tujuan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (*Civil Society*). Sistem pendidikan pun harus mengalami penyesuaian-penyesuaian mengikuti *trend* ke arah pembentukan masyarakat yang lebih mandiri, merdeka dan sedikit sekali ketergantungannya terhadap birokrasi. Peranan birokrasi yang selama ini begitu dominan mewarnai sistem pendidikan nasional tentu secara perlahan harus dirubah, salah satunya dengan menghilangkan sistem sentralisasi pendidikan secara bertahap. Dengan demikian, maka diperlukan paradigma baru pendidikan nasional. Dengan mengacu pada paradigma baru pendidikan ini perlu dilakukan telaah kritis terhadap problem pendidikan nasional, arah kebijakan, dan strategi pemecahannya.

Paradigma Baru Pendidikan

Sistem pendidikan nasional yang berlaku saat ini nyata-nyata memiliki banyak kekurangan baik ditinjau

dari segi muatan, pengelolaan, maupun arah kebijakannya. Untuk itu, diperlukan reformasi yang cukup mendasar terhadap pendidikan nasional.

Kalau pemerintah memang berniat untuk melakukan reformasi di bidang pendidikan, menurut Djohar, jangan tanggung-tanggung (*Kedaulatan Rakyat*, 4 Mei 1999). Perlu dilakukan perubahan mendasar dalam sistem pendidikan kita, termasuk di dalamnya dengan mengubah UU Nomor 2/1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Tanpa pembaharuan sistem secara mendasar, hanya sekedar omong kosong jika ingin melakukan perubahan dalam pendidikan kita. Kini bukan lagi waktunya membebaskan pendidikan hanya pada sekolah. Sudah saatnya institusi masyarakat menjadi institusi pendidikan sehingga pendidikan tidak berarti hanya sekolah tetapi juga keluarga, dan masyarakat. "Masyarakat tidak berarti yang abstrak tetapi dalam arti organisasi-organisasi masyarakat, termasuk di dalamnya organisasi olahraga dan partai politik". Selama ini tidak pernah ada sanksi terhadap institusi masyarakat, sebagai contoh sinetron. Selama ini sinetron kita selalu menampilkan dan mengemas kekerasan. Namun tidak ada yang protes apalagi yang menegurnya karena tidak ada undang-undangnya. Dalam olahraga misalnya, ada kasus bonek yang acap kali membuat tindak kekerasan namun selama ini tidak pernah ditegur karena tidak ada undang-undangnya. "Tidak ada hukum yang mengatakan bahwa mereka juga harus mendidik masyarakat".

Setelah UU-nya dirubah, langkah berikutnya adalah mengubah paradigma pendidikan kita. Ada sepuluh paradigma baru pendidikan yang ditawarkan oleh Djohar. *Satu*, pendidikan adalah proses pembebasan. *Dua*, pendidikan adalah sebagai proses pencerdasan. *Tiga*, pendidikan menjunjung tinggi hak-hak anak. *Empat*, pendidikan menghasilkan tindak perdamaian. *Lima*, pendidikan adalah proses pemberdayaan potensi manusia. *Enam*, pendidikan menjadikan anak berwawasan integratif. *Tujuh*, pendidikan menjadi wahana membangun watak persatuan. *Delapan*, pendidikan menghasilkan manusia demokratis. *Sembilan*, pendidikan menghasilkan manusia yang peduli dengan lingkungan. *Sepuluh*, sekolah bukan satu-satunya instrumen pendidikan.

Dari sepuluh paradigma yang ditawarkan Djohar, penulis beranggapan bahwa yang dimaksud dengan paradigma baru pendidikan adalah pendidikan yang mengacu pada tuntutan globalisasi yang bercirikan kebebasan dalam pengembangan potensi dan bersifat demokratis dalam pengelolaan dan pelaksanaannya, memperhatikan keseimbangan alamiah, dan terinte-

grasi dengan pendidikan rohaniah sehingga perlu penanganan pendidikan yang melibatkan berbagai komponen masyarakat.

Reformasi pendidikan juga harus menyentuh kurikulum pendidikan nasional. Kurikulum yang ada saat ini bersifat seragam sedangkan kondisi masyarakat masing-masing daerah di Indonesia beragam. Karena itu saatnya mengembangkan konsep *diversitas*, karena penyeragaman (*uniformitas*) yang ada ternyata mengakibatkan matinya kreativitas. IKIP Yogyakarta sudah siap menuju paradigma baru itu, antara lain melalui perubahan bentuk dari Institut menjadi Universitas. Universitas menjadi konsep yang mendasar dalam pengembangan karena melalui bentuk yang baru itu calon guru di-*back up* dengan seluruh potensi yang memungkinkannya menjadi profesional. Dengan perubahan yang mendasar maka tatanan sistem akan menjadi lebih mapan dalam rangka menuju terbentuknya masyarakat madani.

Masyarakat madani yang merupakan terjemahan dari kata *Civil Society* disebut juga *Independent Society*, secara harfiah berarti masyarakat yang ketergantungannya terhadap pemerintah relatif kecil, yang umumnya tersentuh oleh peradaban maju. Sesuai dengan ciri masyarakat yang berperadaban maka dalam kehidupan politiknya masyarakat tidak mudah *dipatronasi*, masyarakat yang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, masyarakat yang tahu apa yang harus mereka lakukan, dan masyarakat yang tidak terus-menerus minta dilindungi atau dibantu. Masyarakat madani bisa juga diartikan sebagai masyarakat yang merdeka, memahami hak dan kewajiban sebagai individu atau masyarakat, serta berdaya dalam mengekspresikan kehendaknya dan dalam menentukan kebijakan untuk kesejahteraan hidupnya.

Pada intinya, masyarakat madani adalah masyarakat yang tidak terlalu tergantung pada peran penguasa negara. Ia adalah masyarakat yang memiliki kesadaran kolektif dalam menentukan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. Kesadaran kolektif ini harus terekspresikan pula dalam kesadaran sejarah, kesadaran tentang fakta sosial, dan kesadaran tentang martabat manusia sebagai makhluk yang merdeka, baik sebagai individu maupun sebagai sebuah masyarakat.

Dalam upaya mencapai kehidupan masyarakat madani dan terutama bila dikaitkan dengan momentum kedatangan milenium baru, maka diperlukan telaah dan kajian kritis mengenai berbagai problem pendidikan nasional, arah kebijakan, dan strategi pemecahannya. Kajian ini sangat diperlukan sebagai landasan untuk menuju paradigma baru pendidikan

nasional. Problem pendidikan nasional, arah kebijakan dan strategi pemecahannya merupakan suatu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya.

Sistem Pendidikan Nasional yang baik akan melahirkan generasi baru penerus harapan bangsa dan akan mengantarkan bangsa ini menuju masyarakat madani yang dicita-citakan. Namun ternyata implementasinya tidaklah seindah konsepnya, terbukti dengan gagalnya sistem pendidikan kita melahirkan generasi yang dicita-citakan itu. Untuk itu beberapa langkah berikut harus diprioritaskan oleh penyelenggara negara:

1. Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan.
2. Peningkatan profesionalitas, integritas dan penghargaan kepada guru/pendidik.
3. Peningkatan alokasi anggaran pendidikan yang seimbang.
4. Evaluasi berkesinambungan terhadap sistem pendidikan nasional.

Keempat langkah prioritas di atas harus dikemas dalam satu paradigma yaitu pendidikan yang mengacu pada tuntutan globalisasi yang bercirikan kebebasan dalam pengembangan potensi dan bersifat demokratis dalam pengelolaan dan pelaksanaannya, memperhatikan keseimbangan alamiah, dan terintegrasi dengan pendidikan rohaniah sehingga perlu penanganan pendidikan yang melibatkan berbagai komponen masyarakat. Dengan demikian maka peran pendidikan nasional dalam membentuk kepribadian bangsa yang sangat mengutamakan nilai-nilai religius dalam segenap aspek kehidupannya, harus terus dikokohkan.

Problematika Pendidikan Nasional.

Jika kita amati sekilas, problematika sekolah kita tampak pada tiga indikator utama, yaitu:

1. Merosotnya mutu hasil belajar siswa.
2. Ketidakjelasan relevansi pendidikan sekolah dengan kebutuhan dan cita-cita masyarakat.
3. Rendahnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan persekolahan.

Problem pendidikan yang dimaksudkan tidak hanya ditimbang dari sudut ilmiah paedagogis semata, tetapi juga dari sudut ilmiah syari'iyah. Jika dipetakan, problem tersebut tampak pada tiga wilayah atau ruang lingkup utama yaitu:

1. Wilayah Mikro Operasional

Problem pada ruang lingkup ini muncul dan ditemukan di ruang kelas, tempat siswa secara langsung

berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pengajaran. Telah diidentifikasi secara meluas bahwa penyebab langsung rendahnya mutu hasil belajar siswa berkisar pada tiga persoalan utama:

- a. Kualitas dan kompetensi tenaga pendidik dalam mengelola pembelajaran.
- b. Vasilitas sistem evaluasi hasil belajar, serta
- c. Kualitas dan latar belakang siswa sebagai objek sekaligus subjek pendidikan.

Masalah tenaga pendidik yang menonjol adalah tidak terjadinya kesepadanan antara kebutuhan lapangan dengan penyiapan LPTK dan kebijakan penempatannya, serta migrasi tenaga guru dari daerah terpencil atau pedesaan ke perkotaan. Masalah tenaga pendidik ini menyangkut kebijakan yang lebih luas dan memerlukan tindakan yang bijaksana untuk memperbaikinya secara sistematis.

Selain permasalahan tenaga pendidik, masalah lain yang kerap muncul dalam wilayah makro operasional adalah masalah evaluasi hasil belajar yang terkait dengan bentuk, frekuensi, dan cara penilaian hasil belajar siswa. Ujian diberikan hanya pada akhir proses belajar menggunakan tes obyektif sehingga peserta didik cenderung hanya bisa menghafal.

Permasalahan lain wilayah mikro operasional ini adalah masih tingginya angka putus sekolah serta angka tidak melanjutkan. Siswa sebagai objek dan sekaligus subjek pembelajaran merupakan problem tersendiri yang cukup serius dan kompleks karena menyangkut interaksi berbagai faktor: Tingkat kelenturan sistem dan kebijakan yang diterapkan oleh sekolah dan guru (serta elemen-elemen pemerintahan yang mengontrolnya secara ketat), aspirasi pendidikan dan nilai ekonomi anak di mata orang tuanya, serta aspek-aspek perbedaan individual para peserta didik.

Karena pada wilayah ini siswa berinteraksi langsung dengan anasir pendidikan, maka penelusuran masalah dan langkah awal untuk perbaikan perlu dimulai dari titik ini. Pada skala tersebut, menempatkan guru dengan mutu terbaik untuk mengelola aspek operasional pendidikan dengan sendirinya menjadi pilihan yang paling logis.

2. Wilayah Meso Operasional

Problem yang muncul pada ruang lingkup ini adalah problem dalam sekolah atau lembaga pendidikan tertentu di mana suatu kesatuan pendidikan diselenggarakan. Lemahnya kemampuan mengelola penyelenggaraan sekolah, dapat terlihat dari mutu

perangkat penyelenggaraan yang dapat disediakan dan dikembangkan. Perangkat tersebut setidaknya-tidaknya terdiri atas sembilan komponen, yaitu:

- a. Tujuan pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 3/1989.
- b. Tenaga pendidik yang mengelola proses pembelajaran.
- c. Materi pendidikan yang berwujud bahan-bahan pembelajaran bagi siswa.
- d. Kurikulum yang berwujud petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi tenaga pendidik, orang tua atau tutor.
- e. Peserta didik, yakni siswa dengan ciri dan kualifikasi tertentu.
- f. Sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan pembelajaran tersebut.
- g. Berbagai komponen pembelajaran untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran.
- h. Metode dan proses pembelajaran.
- i. Waktu belajar.

Agar mutu dan efektivitas pendidikan tersebut terkontrol dan tetap sesuai dengan misi pendidikan yang diemban, semua konsep di atas harus memenuhi standar atau kualifikasi tertentu dengan mengacu pada negara yang memiliki mutu pendidikan tinggi tanpa mengabaikan muatan lokal yang spesifik untuk masing-masing negara dan wilayah di Indonesia. Yang paling strategis dari elemen-elemen di atas adalah peserta didik, tenaga pendidik, dan sistem evaluasi.

3. Wilayah Makro Konsepsional

Wilayah ini mencakup sistem pendidikan secara luas di tingkat nasional. Kita menemukan sejumlah problem klasik, seperti:

- a. Ketidakjelasan tujuan pendidikan di mata pengelola pendidikan, masyarakat umum dan orang tua siswa.
- b. Validitas penjabaran tujuan tersebut ke dalam sistem kurikulum.
- c. Ketidakjelasan peran lembaga sekolah dalam keseluruhan aktivitas pendidikan di tengah masyarakat, serta
- d. Kegamangan dalam penetapan kebijakan pendidikan.

Akibat permasalahan di atas, sampai saat ini persoalan mutu, efisiensi, efektivitas dan relevansi pendidikan yang diselenggarakan secara meluas di

tengah masyarakat menjadi sulit dipertanggungjawabkan. Permasalahan tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat dengan koordinasi yang baik melalui departemen pendidikan.

Solusi terhadap problem skala makro ini tidaklah mudah karena menyangkut sistem yang lebih luas yakni administrasi suatu masyarakat secara keseluruhan. Artinya, masalah tersebut mensyaratkan kebijakan baru pemerintah untuk menelaah dan menyusun langkah-langkah solusi yang sistemik, bukan parsial.

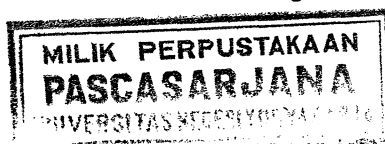
Arah Kebijakan

Untuk mengatasi berbagai kendala dan problema sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka arah kebijakan yang dapat diambil pada skala:

1. Mikro Operasional, misalnya: peningkatan kualitas tenaga kependidikan; peningkatan fasilitas pendidikan.
2. Meso Operasional, misalnya: penyempurnaan manajemen pendidikan; peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat di dalam pendidikan; penyempurnaan sistem evaluasi pendidikan.
3. Makro Konsepsional, misalnya: perluasan dan pemerataan pendidikan, khususnya pendidikan dasar; pengembalian peranan guru/tenaga pendidik; alokasi anggaran pendidikan; reorientasi fungsi dan pandangan masyarakat terhadap sekolah/lembaga pendidikan; evaluasi konsepsional dan operasional sistem pendidikan nasional; penyempurnaan sistem kurikulum dan teknologi instruksional.

Teknologi instruksional adalah lapisan terbawah dari piramida sistem kurikulum. Ia berurusan dengan usaha-usaha peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan belajar mengajar pada wilayah tempat siswa berinteraksi langsung dengan anasir pendidikan. Oleh karena itu, ruang lingkup kegiatan studi, riset dan pengembangan teknologi pembelajaran mencakup enam elemen, yaitu:

- a. *Content* atau pesan yang akan dibawakan oleh kegiatan pendidikan atau pengajaran.
- b. *Persons* atau orang-orang yang akan menyampaikan pesan tersebut kepada peserta didik melalui interaksi yang dirancangnya.
- c. *Media* atau bahan pembelajaran yang di dalamnya tersimpan berbagai pendukung kegiatan operasional pembelajaran.
- d. Prosedur atau skenario yang dirancang untuk mengoptimalkan hasil dan proses interaksi peserta didik dengan media dan persons.



- e. Alat-alat yang akan membantu prosedur interaksi tersebut, dan
- f. Lingkungan fisik-sosial tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan dan pengajaran.

Dengan perkataan lain, teknologi instruksional adalah *software* operasional bagi lembaga pendidikan sedangkan sistem kurikulum dapat dianggap sebagai *software* konseptual dari berbagai kegiatan pendidikan yang diselenggarakan secara meluas di tengah masyarakat atau bangsa tertentu. Artinya, sistem kurikulum dapat dipandang sebagai salah satu unsur terpenting dari sistem pendidikan yang akan diberlakukan secara luas. Unsur lain yang justru menjadi kunci adalah tenaga kependidikan yang akan menjadi pelaksana kedua jenis *software* tersebut.

Dengan ditetapkannya panduan arah atau kebijakan untuk membangun sistem kurikulum dan teknologi instruksional, maka kita diajak untuk membenahi persoalan pendidikan sekolah ini dengan sasaran awal diarahkan pada wilayah yang langsung bersentuhan dengan siswa yakni merekayasa interaksi antara guru dengan muridnya.

Masih dalam kerangka sasaran awal dan berjangka pendek, penjabaran usaha tersebut difokuskan pada:

1. Penyiapan kurikulum berupa bahan-bahan pembelajaran beserta petunjuk pelaksanaannya, dan
2. Penyiapan tenaga kependidikan yang mampu mengoperasikan bahan pembelajaran tersebut sesuai dengan misi yang telah ditetapkan.

Pencapaian sasaran awal tersebut tentu pada saatnya akan diikuti dengan usaha pencapaian sasaran-sasaran berikutnya yang lebih kompleks, yakni membangun sistem kurikulum.

Strategi Umum Pemecahan Problematika Pendidikan Nasional

1. Wilayah Mikro Operasional

- a. Menempatkan tenaga kependidikan terbaik di lapangan operasional agar menghasilkan efek *hidden curriculum* dalam arti yang positif.
- b. Meningkatkan kualitas berbagai aspek kegiatan mengajar (strategi, proses, manajemen, dan sistem evaluasi).
 - 1) Aspek penguasaan strategi pembelajaran
 - 2) Strategi belajar tuntas (*mastery learning*)
 - 3) Strategi pengayaan (*enrichment*)
 - 4) Strategi remedi (*remedial teaching*)

- c. Aspek keterampilan mengefektifkan pembelajaran
 - 1) Pada proses belajar tradisional, di mana kegiatan belajar tergantung dan terfokus pada tenaga pendidik sebagai sumber ilmu dan perekayasa pendidikan.
 - 2) Pada proses belajar menyelidiki (*discovery learning, creative learning*) yang menekankan pada pengalaman yang dilalui siswa.
 - 3) Pada proses belajar mandiri (*student active learning*) di mana belajar terpusat pada aktivitas siswa, bukan lagi pada satu guru.
- d. Aspek peran tenaga pendidik sebagai manajer pembelajaran. Mengembangkan wawasan progresional kependidikan pada tenaga pendidik.

2. Wilayah Meso Operasional

Perluasan kesempatan belajar yang bermutu dengan cara:

- a. Persebaran waktu belajar.
- b. Persebaran tempat belajar.
- c. Peningkatan kemampuan pembiayaan yang sehat dan seimbang dan kontinyu.

3. Wilayah Makro Konseptual

Untuk mencapai misi pendidikan, kita perlu memprioritaskan kebijakan umum pendidikan nasional pada anasir yang strategis, yang difokuskan pada enam butir berikut ini:

- a. Mendorong pemerintah agar memperluas dan menguatkan penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar dengan cara:
 - 1) Meningkatkan status landasan hukum wajib belajar dari sekadar INPRES menjadi Peraturan Pemerintah (sesuai dengan UU No. 2/1989), bahkan diperkuat menjadi Undang-undang.
 - 2) Mengajak setiap komponen dan lapisan masyarakat mengatasi dampak krisis yang berlarut-larut terhadap penyelenggaraan wajib belajar. Hal ini dilakukan dengan cara memobilisasi tenaga pendidik suka rela dan berbagai sumber penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki keluarga dan masyarakat.
 - 3) Mengajak seluruh lapisan masyarakat, terutama yang masih memiliki anak usia sekolah agar tetap mempertahankan anaknya dalam

- kegiatan belajar dalam bentuk apapun, dengan menunjukkan relevansinya bagi kehidupan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dari dunia sampai akhirat.
- b. Mengajak seluruh komponen bangsa, terutama pemerintah, untuk melakukan tindakan nyata dalam rangka mengembalikan peran guru sebagai unsur kunci dalam pendidikan dan pembangunan bangsa. Memberantas kebijakan dan praktik-praktik masa lalu yang mengakibatkan degradasi, devaluasi dan distorsi peran guru dan pendidikan di tengah arus perubahan masyarakat. Tindakan nyata tersebut setidaknya menyangkut penataan menyeluruh dan mendasar terhadap kualifikasi profesional guru dan pendidik yang diikuti dengan sistem penghargaan (material dan non-material) yang setara.
 - c. Mengajak pemerintah untuk terus-menerus meningkatkan alokasi anggaran pemerintah bagi penyelenggaraan pendidikan yang mencerminkan tindakan nyata dalam pendidikan secara umum, hingga mencapai sekurang-kurangnya 25% dari APBN atau 10% dari GNP dalam 2 sampai 3 tahun mendatang.
 - d. Mengajak seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah untuk melakukan tindakan nyata dan signifikan untuk mengubah distorsi alokasi pendidikan yang sangat berpihak pada pendidikan tinggi (yang hanya diikuti oleh kurang dari 1% penduduk Indonesia). Distorsi ini sangat mengorbankan pendidikan dasar yang seharusnya dapat dijangkau oleh seluas-luasnya warga negara.
 - e. Mengajak seluruh komponen bangsa melakukan evaluasi sistemis terhadap berbagai aspek konseptual dan operasional dari Sistem Pendidikan Nasional pada semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan. Seluruh komponen bangsa dilibatkan dalam kegiatan pendidikan melalui jalur formal (persekolahan) atau melalui jalur nonformal (pesantren, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lembaga pendidikan nonformal lainnya). Pelaksanaan wajib belajar misalnya, dikordinasikan secara lebih baik sehingga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Koordinasi antara lembaga pendidikan dengan industri atau kalangan bisnis sebagai penyedia dana lebih ditingkatkan. Dan jam belajar masyarakat benar-benar bisa dilaksanakan dengan pemantauan dari seluruh komponen masyarakat baik melalui jalur LSM, partai politik, maupun lembaga keagamaan yang mengakar di masyarakat. Hal ini dilaksanakan sedemikian rupa sehingga mencerminkan kesanggupan menempatkan pendidikan sebagai usaha membangun masa depan Indonesia menuju masyarakat madani yang religius, mandiri, demokratis, majemuk, maju, sejahtera dan adil.
 - f. Mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menggali dan merekonstruksi kasanah nilai-nilai dan budaya bangsa Indonesia yang religius dan majemuk untuk dijadikan landasan yang kokoh bagi pengembangan dan penyempurnaan terus menerus kurikulum pendidikan nasional yang sah dan relevan dengan masa depan Indonesia.

Kesimpulan

Paradigma baru pendidikan diperlukan untuk mendorong perubahan tatanan kehidupan menuju masyarakat madani. Perubahan itu perlu dilakukan secara mendasar pada semua wilayah operasional, baik menyangkut Undang-undang, kurikulum, maupun sistem evaluasinya.

Paradigma baru perlu didukung oleh telaah kritis terhadap problematika Pendidikan Nasional, arah kebijakan dan strategi pemecahannya. Problematika yang muncul dapat dipetakan pada tiga ruang lingkup utama yaitu, wilayah mikro operasional, meso operasional, dan makro konseptual, sehingga strategi pemecahannya mengacu pada tiga ruang lingkup utama ini.

Daftar Pustaka

- Djohar. *Kedaulatan Rakyat*. 4 Mei 1999. Yogyakarta.
- Suryama, R.B., dan Sudiana D. (1998). *Telaah Awal Terhadap Problem Pendidikan Nasional, Arah Kebijakan Dan Strategi Pemecahannya*. Makalah Dialog Nasional Pendidikan. 26 Desember 1998. IKIP Yogyakarta.
- Wahjoetomo. (1993). *Beberapa Pokok Pikiran Tentang Pelaksanaan Pendidikan Sebagai Jawaban Atas Isu: Deregulasi Pendidikan*. P.T. Grasindo. Jakarta.

- e. Alat-alat yang akan membantu prosedur interaksi tersebut, dan
- f. Lingkungan fisik-sosial tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan dan pengajaran.

Dengan perkataan lain, teknologi instruksional adalah *software* operasional bagi lembaga pendidikan sedangkan sistem kurikulum dapat dianggap sebagai *software* konsepsional dari berbagai kegiatan pendidikan yang diselenggarakan secara meluas di tengah masyarakat atau bangsa tertentu. Artinya, sistem kurikulum dapat dipandang sebagai salah satu unsur terpenting dari sistem pendidikan yang akan diberlakukan secara luas. Unsur lain yang justru menjadi kunci adalah tenaga kependidikan yang akan menjadi pelaksana kedua jenis *software* tersebut.

Dengan ditetapkannya panduan arah atau kebijakan untuk membangun sistem kurikulum dan teknologi instruksional, maka kita diajak untuk membenahi persoalan pendidikan sekolah ini dengan sasaran awal diarahkan pada wilayah yang langsung bersentuhan dengan siswa yakni merekayasa interaksi antara guru dengan muridnya.

Masih dalam kerangka sasaran awal dan berjangka pendek, penjabaran usaha tersebut difokuskan pada:

1. Penyiapan kurikulum berupa bahan-bahan pembelajaran beserta petunjuk pelaksanaannya, dan
2. Penyiapan tenaga kependidikan yang mampu mengoperasikan bahan pembelajaran tersebut sesuai dengan misi yang telah ditetapkan.

Pencapaian sasaran awal tersebut tentu pada saatnya akan diikuti dengan usaha pencapaian sasaran-sasaran berikutnya yang lebih kompleks, yakni membangun sistem kurikulum.

Strategi Umum Pemecahan Problematika Pendidikan Nasional

1. Wilayah Mikro Operasional

- a. Menempatkan tenaga kependidikan terbaik di lapangan operasional agar menghasilkan efek *hidden curriculum* dalam arti yang positif.
- b. Meningkatkan kualitas berbagai aspek kegiatan mengajar (strategi, proses, manajemen, dan sistem evaluasi).
 - 1) Aspek penguasaan strategi pembelajaran
 - 2) Strategi belajar tuntas (*mastery learning*)
 - 3) Strategi pengayaan (*enrichment*)
 - 4) Strategi remedi (*remedial teaching*)

- c. Aspek keterampilan mengefektifkan pembelajaran
 - 1) Pada proses belajar tradisional, di mana kegiatan belajar tergantung dan terfokus pada tenaga pendidik sebagai sumber ilmu dan perekayasa pendidikan.
 - 2) Pada proses belajar menyelidiki (*discovery learning, creative learning*) yang menekankan pada pengalaman yang dilalui siswa.
 - 3) Pada proses belajar mandiri (*student active learning*) di mana belajar terpusat pada aktivitas siswa, bukan lagi pada satu guru.
- d. Aspek peran tenaga pendidik sebagai manajer pembelajaran. Mengembangkan wawasan progresional kependidikan pada tenaga pendidik.

2. Wilayah Meso Operasional

Perluasan kesempatan belajar yang bermutu dengan cara:

- a. Persebaran waktu belajar.
- b. Persebaran tempat belajar.
- c. Peningkatan kemampuan pembiayaan yang sehat dan seimbang dan kontinyu.

3. Wilayah Makro Konsepsional

Untuk mencapai misi pendidikan, kita perlu memprioritaskan kebijakan umum pendidikan nasional pada anasir yang strategis, yang difokuskan pada enam butir berikut ini:

- a. Mendorong pemerintah agar memperluas dan menguatkan penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar dengan cara:
 - 1) Meningkatkan status landasan hukum wajib belajar dari sekadar INPRES menjadi Peraturan Pemerintah (sesuai dengan UU No. 2/1989), bahkan diperkuat menjadi Undang-undang.
 - 2) Mengajak setiap komponen dan lapisan masyarakat mengatasi dampak krisis yang berlarut-larut terhadap penyelenggaraan wajib belajar. Hal ini dilakukan dengan cara memobilisasi tenaga pendidik suka rela dan berbagai sumber penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki keluarga dan masyarakat.
 - 3) Mengajak seluruh lapisan masyarakat, terutama yang masih memiliki anak usia sekolah agar tetap mempertahankan anaknya dalam

- kegiatan belajar dalam bentuk apapun, dengan menunjukkan relevansinya bagi kehidupan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dari dunia sampai akhirat.
- b. Mengajak seluruh komponen bangsa, terutama pemerintah, untuk melakukan tindakan nyata dalam rangka mengembalikan peran guru sebagai unsur kunci dalam pendidikan dan pembangunan bangsa. Memberantas kebijakan dan praktik-praktik masa lalu yang mengakibatkan degradasi, devaluasi dan distorsi peran guru dan pendidikan di tengah arus perubahan masyarakat. Tindakan nyata tersebut setidaknya menyangkut penataan menyeluruh dan mendasar terhadap kualifikasi profesional guru dan pendidik yang diikuti dengan sistem penghargaan (material dan non-material) yang setara.
 - c. Mengajak pemerintah untuk terus-menerus meningkatkan alokasi anggaran pemerintah bagi penyelenggaraan pendidikan yang mencerminkan tindakan nyata dalam pendidikan secara umum, hingga mencapai sekurang-kurangnya 25% dari APBN atau 10% dari GNP dalam 2 sampai 3 tahun mendatang.
 - d. Mengajak seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah untuk melakukan tindakan nyata dan signifikan untuk mengubah distorsi alokasi pendidikan yang sangat berpihak pada pendidikan tinggi (yang hanya diikuti oleh kurang dari 1% penduduk Indonesia). Distorsi ini sangat mengorbankan pendidikan dasar yang seharusnya dapat dijangkau oleh seluas-luasnya warga negara.
 - e. Mengajak seluruh komponen bangsa melakukan evaluasi sistemis terhadap berbagai aspek konseptual dan operasional dari Sistem Pendidikan Nasional pada semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan. Seluruh komponen bangsa dilibatkan dalam kegiatan pendidikan melalui jalur formal (persekolahan) atau melalui jalur nonformal (pesantren, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lembaga pendidikan nonformal lainnya). Pelaksanaan wajib belajar misalnya, dikoordinasikan secara lebih baik sehingga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Koordinasi antara lembaga pendidikan dengan industri atau kalangan bisnis sebagai penyedia dana lebih ditingkatkan. Dan jam belajar masyarakat benar-benar bisa dilaksanakan dengan pemantauan dari seluruh komponen masyarakat baik melalui jalur LSM, partai politik, maupun lembaga keagamaan yang mengakar di masyarakat. Hal ini dilaksanakan sedemikian rupa sehingga mencerminkan kesanggupan menempatkan pendidikan sebagai usaha membangun masa depan Indonesia menuju masyarakat madani yang religius, mandiri, demokratis, majemuk, maju, sejahtera dan adil.
 - f. Mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menggali dan merekonstruksi kasanah nilai-nilai dan budaya bangsa Indonesia yang religius dan majemuk untuk dijadikan landasan yang kokoh bagi pengembangan dan penyempurnaan terus menerus kurikulum pendidikan nasional yang sah dan relevan dengan masa depan Indonesia.

Kesimpulan

Paradigma baru pendidikan diperlukan untuk mendorong perubahan tatanan kehidupan menuju masyarakat madani. Perubahan itu perlu dilakukan secara mendasar pada semua wilayah operasional, baik menyangkut Undang-undang, kurikulum, maupun sistem evaluasinya.

Paradigma baru perlu didukung oleh telaah kritis terhadap problematika Pendidikan Nasional, arah kebijakan dan strategi pemecahannya. Problematika yang muncul dapat dipetakan pada tiga ruang lingkup utama yaitu, wilayah mikro operasional, meso operasional, dan makro konseptual, sehingga strategi pemecahannya mengacu pada tiga ruang lingkup utama ini.

Daftar Pustaka

- Djohar. *Kedaulatan Rakyat*. 4 Mei 1999. Yogyakarta.
- Suryama, R.B., dan Sudiana D. (1998). *Telaah Awal Terhadap Problem Pendidikan Nasional, Arah Kebijakan Dan Strategi Pemecahannya*. Makalah Dialog Nasional Pendidikan. 26 Desember 1998. IKIP Yogyakarta.
- Wahjoetomo. (1993). *Beberapa Pokok Pikiran Tentang Pelaksanaan Pendidikan Sebagai Jawaban Atas Isu: Deregulasi Pendidikan*. P.T. Grasindo. Jakarta.